



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Januari 2013

Halaman: 3

Pemkot Biarkan Pelanggaran Parkir Sekaten

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dinilai membiarkan penggelembungan tarif parkir Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2013 yang sudah lama disoroti. Pemkot hanya berjanji bakal memanggil para juru parkir (jukir) yang ditengarai menaikkan tarif.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Muhammad Syafii menyatakan, fakta penggelembungan tarif parkir Sekaten sudah diberitakan media sejak awal pelaksanaan PMPS. Namun hingga agenda tahunan berakhir 24 Januari lalu tak ada langkah tegas dilakukan Pemkot.

"Buktinya sudah ada bahkan ada foto karcis tarif parkir yang dibuat sendiri juru parkir, tapi nyatanya Satpol PP atau pemerintah juga tidak bergerak hampir dua bulan sampai acaranya selesai. Ini sama saja mereka membiarkan," kritik Muhammad Syafii.

Dewan sendiri menurutnya tak punya kuasa sebagai untuk menindak pelanggaran. Namun perkara ini bakal menjadi catatan buruk bagi penyelenggaraan sekaten oleh Pemkot Jogja. Pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Jogja pada Maret mendatang, ia memastikan perkara penggelembungan tarif parkir bakal menjadi sorotan Dewan. "Ini preseden buruk, mereka [Pemkot] tidak bisa bertindak tegas," ungkapnya.

Wakil Walikota Jogja Imam Priyono, Rabu (30/1) menegaskan, perlunya tindakan tegas terkait ulah para jukir menaikkan tarif tak sesuai ketentuan tersebut, di antaranya memanggil dan memberi peringatan pada jukir. "Kami akan panggil, baik itu juru musiman atau juru parkir yang setiap hari bekerja di situ. Kalau memang itu jukir musiman kepinginnya apa," tegasnya.

Tarif parkir kendaraan paling banyak mendapat sorotan dari pelaksanaan PMPS 2013, baik dari lembaga perwakilan rakyat, masyarakat maupun kerabat Kraton Jogja. Tarif parkir kendaraan roda dua kala itu di-gelembungkan dari tarif seharusnya Rp2.000 menjadi Rp3.000-Rp4.000. Sementara tarif parkir mobil mencapai hingga Rp10.000.

Kenaikan tarif tersebut menurut Imam jelas merugikan masyarakat. "Memang juru parkir juga butuh peningkatan ekonomi tapi jangan sampai merugikan warga," pungkasnya. (Bhekti Suryanti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005